

**PENYIDIKAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG (TRAFFICKING)  
(STUDI DI POLRES KOTA BATU)**

**JURNAL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:  
INTAN CHINTYA D  
NIM. 0910113024



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2013**

## **LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : PENYIDIKAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (STUDI DI POLRES  
KOTA BATU)

Identitas Penulis :  
a. Nama : Intan Chintya Dewi  
b. Nim : 0910113024

Konsentrasi : Hukum Pidana  
Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Prof., Masruchin Ruba'I, S.H., M.S.,**  
**NIP. 19481230 197312 1 001**

**Paham Triyoso, S.H., M. Hum.,**  
**NIP. 19540517 198203 1 003**

Mengetahui  
Ketua Bagian  
Hukum Keadilan

**Eny Harjati., S.H., M.H.**  
**NIP. 19590406 198601 2 001**

**JURNAL ILMIAH**  
**PENYIDIKAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN**  
**ORANG**  
**OLEH : INTAN CHINTYA DEWI**  
**ABSTRAK**

Karya ilmiah yang berjudul Penyidikan Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ini membahas tentang semakin meluasnya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, terutama di wilayah Polres Kota Batu. Dan bagaimana kinerja penyidik dalam melakukan proses penyidikan dalam kasus tindak pidana tersebut. Disebutkan oleh penyidik, dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini, utamanya yang terjadi di Polres Kota Batu kebanyakan atau mayoritas korbannya adalah anak-anak atau orang yang sering dianggap dibawah umur dan para remaja atau pelajar. Penyidik dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang ini juga mengalami hambatan atau kesulitan dikarenakan beberapa faktor dari korban maupun tersangkanya itu sendiri.

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi tentang proses penyidikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui wawancara dengan penyidik yang bersangkutan di tempat yang ditunjuk untuk melakukan penelitian.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan Penelitian Hukum Empiris. Data dalam karya ilmiah ini diperoleh dari hasil wawancara dengan penyidik yang ada di lapangan khususnya yang menyelesaikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik yang menyelesaikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya penyidik di Polres Kota Batu bagian Unit PPA, bahwa pasal yang dijeratkan kepada tersangka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang telah sesuai dalam pasal yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik juga telah sesuai

dengan alur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, namun sedikit perbedaan dalam penyidikannya.

**Kata Kunci : Penyidikan dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan  
Orang**

**ABSTRACT**

The scientific work entitled investigation in trafficking case crime is about the widespread human trafficking is happening in indonesia, particularly in the area of batu police. And how is the investigation in conducting the investigation in the criminal case. Mentioned by the investigator, in the case of human trafficking is, primarily occuring in batu police majority or the majority of victims are children or people who are considered minors and teenagers or students. Investigators in conducting investigations and criminal investigations of trafficking in persons also experience barriers or difficulties due to several factors from the victim and the suspects themselves.

The purpose of writing this paper is to investigate and identify the process of investigating the case of the crime of trafficking in persons through interviews with investigators concerned at the designated place to do research.

The method used in this paper is using empirical legal research. The data in this scientific work obtained from interviews with investigators on the ground especially a completed case the crime of trafficking in persons.

Based on the interview with the investigator to solve the case the crime of trafficking in persons, especially the police investigator in sections Unit Batu PPA, that article dijeratkan the suspect in the crime of trafficking in persons in compliance in the article that has been regulated in the law on combating the crime of trafficking people. The investigation conducted by the investigators also are compliant with the flow regulated in the criminal justice act, but little difference in the investigation.

Keywords : Investigations in the case of the Crime of Trafficking in  
Persons

## 1. Pendahuluan

Era globalisasi dan modernisasi di Indonesia memiliki kecenderungan kompleksitas untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*). Para pelaku dan pengguna jasanya juga sudah merambah berbagai usia. Perdagangan orang (*human trafficking*) menjadi isu utama dalam kehidupan nasional dan internasional saat ini. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perbudakan modern (*modern day slavery*) yang sangat memerlukan perhatian dan tindakan baik secara nasional maupun secara internasional.

Indonesia merupakan salah satu kawasan potensial perdagangan anak dan perempuan. Anak-anak banyak yang bekerja diluar batas kemampuan anak-anak itu sendiri. Mereka bekerja dari siang hingga malam hari. Sehingga menyebabkan penyidik mengalami kendala dan hambatan dalam menangani kasus yang semakin hari semakin berkembang terutama dalam hal perdagangan orang, karena penyidik ikut andil dalam penyelesaian masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang melibatkan anak-anak maupun perempuan dari rawannya perdagangan orang.

Berdasarkan pada masalah tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyidikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena Anak juga mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anak merupakan salah satunya kewajiban orang tua untuk memberikan dan memenuhi hak dan kewajiban anak tersebut. Untuk bisa melihat keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut perlu juga kita lihat kembali, bahwa dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak), ada 4 hak dasar, antara lain: hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang, tumbuh berarti secara fisik (tinggi dan berat badannya) sedangkan berkembang, kejiwaannya, dari tidak bisa berbicara menjadi bisa berbicara, anak-anak

berhak untuk mendapat asupan makanan yang bergizi untuk pertumbuhannya, perlu belajar sekolah, bermain, mendapatkan kasih sayang dan lain-lain.

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai tindakan kejahatan, eksploitasi dan kekerasan oleh siapapun terutama oleh orang tua kandungnya sendiri. Hak untuk berpartisipasi, hak untuk berpendapat bukan hanya untuk orang dewasa, anak-anak pun berhak untuk menyampaikan pendapatnya, gagasan dan ketidaksetujuan. Selain hak, anak juga mempunyai kewajiban, kewajiban anak secara umum adalah menghormati orang dewasa dan sesamanya, belajar dengan giat.

Pada era industrialisasi yang berlangsung di Indonesia ini, yang berubah bukanlah keterlibatan anak-anak di dalam angkatan kerja tetapi yang terjadi adalah perubahan bentuk dan sifat keterlibatan mereka. Bila di era sebelumnya anak-anak banyak terlibat di sektor pertanian yang tak dibayar karena hanya sebatas membantu pekerjaan orang tuanya, maka pada era industrialisasi keterlibatan anak-anak itu telah bergeser ke sektor industri, perdagangan, dan jasa sebagai tenaga kerja upahan.

Malang sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga menyimpan banyak masalah dan segala problemnya. Terutama di daerah pedesaan seperti batu, pujon, dan lain-lain. Pertumbuhan infrastruktur yang begitu cepat memaksa kaum marginal di kota Malang ikut terdesak termasuk perdagangan anak. Dengan kerasnya kehidupan kota, anak-anak pun juga ikut merasakan sebagai korban yang salah dari didikan orang tuanya.

Lalu, dalam Polres Batu juga terdapat tindak pidana perdagangan orang yang setiap tahunnya selalu ada saja pelaku maupun pengguna jasa yang dikenakan sanksi oleh pihak kepolisian. Penelitian ini penulis lebih tertarik meneliti di Polres Batu karena menurut data yang didapatkan oleh penulis dari tahun 2009 hingga tahun 2012 meskipun tidak melaju pesat tetapi selalu ada tindak pidana perdagangan orang, terutama korban perdagangannya adalah anak-anak. Yang lebih menarik perhatian, pada saat proses penyelidikan, sampai ke penyidikan, pihak kepolisian mendapatkan kesulitan dan hambatan yang membuat tidak cepat selesai prosesnya dan memerlukan

waktu yang lama. Seperti contohnya, Data tersebut adalah pada tahun 2009 telah terjadi pengiriman 6 orang anak yang mau dibawa ke Kalimantan dan pelakunya adalah 2 perempuan, dan penyidik selaku penyelesai kasus tindak pidana perdagangan orang ini sempat mengalami kesulitan dan hambatan dalam proses penyidikannya. Dalam penelitian ini, penulis akan mengangkat dan meneliti tentang penyidikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena sering kita dengar di media massa maupun di media elektronik penyidik dalam proses penyidikan terutama dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan, yang karena faktor-faktor tertentu.

Korban tindak pidana perdagangan orang yang sering kebanyakan di bawah umur atau sering disebut anak-anak. Yang dimaksud batas usia anak atau dibawah umur adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.<sup>1</sup> Dan yang dinamakan Anak adalah generasi penerus bagi orang tuanya, yang mewarisi sifat-sifat orang tuanya, yang melanjutkan harapan dan cita-cita orang tuanya. Dan disini terdapat hambatan penyidik dalam menangani kasus Perdagangan Orang yang korbannya anak.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang antara lain adalah :

- A. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
- B. Apa hambatan penyidik dalam proses penyidikan menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang?

---

<sup>1</sup> Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak. (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 24

C. Apa upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk menanggulangi hambatan dalam proses penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang dan ketentuan dalam undang-undang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penyidik dalam proses penyidikan menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang diambil oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi hambatan yang telah terjadi dalam proses penyidikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **3. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan cara melakukan penelitian lapangan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara studi lapang atau apa yang terjadi di lapangan sesuai fakta yang didukung dengan kepustakaan atau literatur yang terdapat di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) dan akses internet melalui berbagai situs.

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.

### **4. Hasil dan Pembahasan**



#### **A. Proses Penyidikan Terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia dengan perdagangan manusia yang terjadi di wilayah Kota Batu sangatlah berbeda. Ini dikarenakan masyarakat dengan lingkup luas dan masyarakat dengan lingkup sempit juga berbeda. Masyarakat dengan lingkup luas yang disebut dengan masyarakat Indonesia, dimana kebutuhan yang dialami sangat berbeda dengan kebutuhan masyarakat lingkup sempit di wilayah Kota Batu yang masih dapat dikatakan primitif. Dengan adanya masyarakat Kota Batu yang primitif dan tidak begitu memahami tentang perdagangan manusia, maka masih banyak yang ingin mencoba-coba termasuk mencoba untuk bekerja apapun asalkan mendapatkan upah, padahal bekerjanya untuk diperdagangkan dirinya kepada orang yang tidak dikenalnya.

Masyarakat Kota Batu yang masih primitif dan masih belum seberapa mengenal dunia luar yang begitu kejam, yang terjatuh kasus tindak pidana perdagangan orang, baik sebagai pelaku maupun korban juga cukup banyak, sehingga petugas kepolisian melakukan penyidikan dalam kasus tersebut. Proses penyidikan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Unit PPA telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (selanjutnya disebut KUHAP). Seperti urutan di bawah ini:

##### **a. Panggilan**

Yang dimaksud dalam panggilan ini, petugas kepolisian memanggil para pihak untuk dimintai keterangan awal sebelum memasuki langkah penyidikan selanjutnya.

##### **b. Penangkapan**

Merupakan suatu tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup

merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantaranya yaitu pemanggilan dan perintah membawa.

c. Penahanan

Dapat dilakukan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang apabila tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan dan dugaan keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.

d. Pengeledahan dan Penyitaan

Pada pasal 1 butir ke 17 KUHAP telah dijelaskan mengenai Pengeledahan rumah. Pengeledahan rumah yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 butir ke 18 KUHAP telah dijelaskan mengenai Pengeledahan badan. Pengeledahan badan merupakan tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Sedangkan penyitaan dijelaskan dalam pasal 1 butir ke 16 KUHAP, disitu menyebutkan bahwa serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

e. Keterangan Saksi

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap saksi, penyidik tidak melakukan pemanggilan terhadap saksi, melainkan saksi datang sendiri ke Polres Kota Batu.

f. Pemeriksaan Tersangka

Sesuai dengan ketentuan pasal 50 KUHAP, tersangka berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik, dengan tujuan menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya perkara sehingga dirasa tidak ada kepastian hukum demi mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

g. Penyusunan Berkas Acara Pemeriksaan dan Pasal yang Disangkakan oleh Penyidik

Penyusunan BAP merupakan langkah akhir untuk melakukan proses penyidikan, yang kemudian BAP dikirim kepada Kejaksaan untuk diperiksa. Dan untuk mengetahui keputusan dari pihak Kejaksaan, apakah BAP dapat diterima atau tidak.

**B. Hambatan-Hambatan Dalam Melakukan Proses Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Setelah dijelaskan dalam uraian kasus pertama dan kedua di atas, polisi terutama yang bekerja dalam pelaksanaan proses penyidikan sering mengalami hambatan dalam melakukan penyidikan, seperti contohnya antara lain :

1. Korban tidak mau melapor/ kebanyakan korban tertangkap tangan bahwa mereka-mereka termasuk dalam korban tindak pidana perdagangan orang, dan kebanyakan keluarga dari mereka-mereka sebagai korban yang melapor kepada pihak kepolisian.
2. Korban sering tidak kooperatif dalam penyidik yang melakukan penyidikan, dan masih kebanyakan menutup-nutupi pekerjaan mereka atau kebiasaan mereka menjual diri.
3. Pekerjaan itu sudah merupakan kebiasaan si korban, karena korban merasa kebutuhannya belum terpenuhi oleh orang tuanya, maka korban melakukan pekerjaan tersebut, dan hambatannya di petugas

tidak dapat memberitahu si korban bahwa pekerjaan tersebut tidak baik bagi si korban.

**C. Upaya dalam menanggulangi hambatan pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dalam setiap melakukan proses penyidikan, selalu ada hambatan dan selalu ada pula upaya untuk menanggulangi hambatan tersebut. Dan berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan tim PPA Polres Kota Batu salah satunya Briptu Pradityo Tri Nugroho selaku anggota PPA yang bekerja di Polres Kota Batu.<sup>2</sup> Tindakan Polres Kota Batu dalam upaya menanggulangi hambatan terhadap tindak pidana perdagangan orang tersebut, merupakan tindakan nyata pihak kepolisian Kota Batu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Menurut beliau pada dasarnya upaya menanggulangi hambatan tersebut, meliputi 3 hal, yaitu:

1. Upaya penanggulangan hambatan yang pertama, dilakukan secara persuasif, dalam hal ini pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah si korban apabila si korban tidak mau melapor kepada pihak kepolisian, dan jika si korban tetap tidak mau di periksa di rumah maka pihak kepolisian secara pelan-pelan membuat janji dengan korban dengan kata lain “menjemput bola” dimana pihak kepolisian akan mengalah kepada korban sampai korban mau dilakukan pemeriksaan untuk dibuatkan BAP.
2. Upaya penanggulangan hambatan yang kedua, jika si korban tertutup atau kurang kooperatif, seperti yang dijelaskan pada hambatan nomor 2, maka pihak kepolisian melakukan upaya dengan cara meyakinkan menggunakan kata-kata, atau memberikan sesuatu yang diinginkan oleh si korban sehingga korban tergiur dan

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Pradityo Tri Nugroho, selaku Anggota Penyidik PPA, tanggal 12 Februari 2013

korban mau menjelaskan secara detail tentang kejadian tindak pidana tersebut. Jika dalam hal itu, si korban tetap tidak terbuka, maka dengan jalan lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu menanyai saksi-saksi dan tersangka sehingga tahu alur cerita tindak pidana tersebut.

3. Upaya penanggulangan yang ketiga, dalam mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana perdagangan orang ini, yang telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang tertera pada hambatan nomor 3, maka pihak kepolisian dapat memberikan saran kepada orang tua si korban untuk menjaga anak perempuannya lebih ketat, dan korban dinasehati dengan cara halus. Lalu, pihak kepolisian juga dapat meminta tolong kepada ketua RT atau RW setempat untuk mengawasi warganya, terutama yang telah terkena sebagai korban tindak pidana tersebut. Alternatif terakhir yang dilakukan pihak kepolisian jika si korban tidak dapat diberitahu bahwa hal tersebut tidak baik baginya, maka pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan, terutama di kota batu. Salah satunya Bimasakti, dan USM yang terletak di daerah Songgoriti Kota Batu yang berfungsi sebagai Rumah Perlindungan Sosial Anak yang kebanyakan korbannya merupakan korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>3</sup>

Ketiga upaya penanggulangan hambatan di atas merupakan langkah akhir yang dilakukan oleh pihak Unit PPA dalam melakukan proses penyidikan yang mengalami suatu hambatan.

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Briptu Pradityo Tri Nugroho, selaku Anggota Penyidik PPA, tanggal 12 Februari 2013

## **5. Penutup**

### **A. Kesimpulan**

1. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Kota Batu terutama di bagian Unit PPA yang menangani masalah tindak pidana perdagangan orang telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berikut uraian tentang proses penyidikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan KUHAP. Dimulai dari diterimanya laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang, lalu petugas kepolisian melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, yaitu menggerebek tempat atau lokasi dimana terjadi tindak pidana. Kemudian petugas kepolisian menyuruh berhenti kegiatan atau aktifitas pada saat itu dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka tindak pidana terlebih dahulu. Lalu setelah memeriksa, petugas kepolisian melakukan penangkapan pada para pihak yang bersangkutan, penahanan pada tersangka, penggeledahan badan, rumah sewaan untuk tempat persembunyian, dan penyitaan barang bukti yang ada pada saat itu, misalnya uang sebesar Rp 150.000,- dan mobil untuk mengangkut para korban tindak pidana perdagangan orang dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang dianggap

sebagai tersangka tindak pidana tersebut. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Kemudian dibuatkan berkas acara perkara oleh petugas kepolisian, dan setelah berkas semua lengkap dapat dikirim kepada kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Pembuatan BAP (Berkas Acara Perkara) dapat dibuat dan disusun Seperti yang dijelaskan pada pasal 75 tentang Pembuatan Berita Acara.

2. Setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh petugas kepolisian tidak selalu lancar dan cepat dalam penanganannya, tetapi juga terdapat beberapa hambatan untuk melakukan proses penyidikan tersebut. Hambatan yang dialami oleh petugas kepolisian dalam menangani tindak pidana perdagangan orang, antara lain:
  - a. Korban tidak mau melapor/ kebanyakan korban tertangkap tangan
  - b. Korban sering tidak kooperatif atau sering menutup-nutupi masalahnya sendiri
  - c. Pekerjaan itu sudah merupakan kebiasaan si korban, sehingga petugas kepolisian yang akan memberikan penyuluhan, sangatlah tidak mudah untuk membantu mengurangi tindak pidana perdagangan orang yang telah meluas di kalangan anak-anak ataupun remaja.

Itulah beberapa hambatan yang dialami oleh petugas kepolisian dalam menangani penyidikan tindak pidana perdagangan orang. Setiap terdapat hambatan selalu ada upaya penanggulangan, dan petugas kepolisian dalam menanggulangi hambatan yang terjadi terdapat beberapa upaya, antara lain:

- a. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah si korban apabila si korban tidak mau melapor kepada pihak kepolisian

- b. Pihak kepolisian melakukan upaya dengan cara merayu, atau memberikan sesuatu yang diinginkan oleh si korban sehingga korban tergiur dan korban mau menjelaskan secara detail tentang kejadian tindak pidana tersebut
- c. Pihak kepolisian dapat memberikan saran kepada orang tua si korban untuk menjaga anak perempuannya lebih ketat, dan korban dinasehati dengan cara halus.

## **B. Saran**

1. Kurangnya anggota penyidik yang bertugas di bagian Unit PPA merupakan suatu hambatan untuk menyelesaikan penyidikan terutama dalam melakukan penyidikan tindak pidana perdagangan orang. Karena proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang membutuhkan banyak petugas untuk melakukan penyelidikan. Hal ini dapat penulis berikan di bagian saran supaya pihak kepolisian dapat menambahkan anggota bagian Unit PPA yang bertujuan untuk memperlancar penyidikan maupun penyelidikan.
2. Tidak adanya kepedulian kepada korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga korban tindak pidana itu sendiri tidak menyadari bahwa mereka sebagai korban, maka pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan. Terutama di kota batu. Salah satunya Bimasakti, dan USM yang terletak di daerah Songgoriti Kota Batu yang berfungsi sebagai Rumah Perlindungan Sosial Anak yang kebanyakan korbannya merupakan korban tindak pidana perdagangan orang.

## **6. Daftar Pustaka**

### **BUKU**



Maulana Hassan Wadong, 2000, Pengantar Advokasi Dan Hukum  
Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta

### **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang